



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

# PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS KKNi DAN BERWAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI PROGRAM DUKUNGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI BIDANG PENDIDIKAN

**Deny Setiawan**

Jurusan PPKn FIS UNIMED

e-mail: geodeny@ymail.com

## ABSTRAK

Globalisasi yang tengah bergulir membawa sejumlah tuntutan yang perlu di respon oleh dunia pendidikan, tak terkecuali oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran untuk hidup dan kehidupan. Dalam rangka memenuhi tuntutan, yakni menghasilkan lulusan yang memiliki sejumlah kompetensi untuk dapat berdaya saing dalam kehidupan abad ke-21, diusulkan adanya upaya revitalisasi LPTK melalui implementasi kurikulum yang berorientasi KKNi dan berwawasan kebangsaan. Ouput dari pemberlakuan dari kurikulum ini, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi intelektual dengan karakter berwawasan kebangsaan. *Nation and Character Building* tetap dijadikan landasan revitalisasi untuk menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan dengan ciri memiliki: (1) pandangan *politic of recognition*; (2) prinsip *human dignity*; (3) *sense of social consciousness*; dan (4) rasa kebangsaan.

**Kata kunci:** kurikulum, wawasan kebangsaan, pembangunan keberlanjutan

## PENDAHULUAN

Pada prinsipnya globalisasi merupakan suatu proses yang bergerak dengan kecepatan berbeda di berbagai wilayah dan masyarakat di planet bumi. Sebagai suatu proses, globalisasi menuntut adanya interaksi antar bangsa yang di dalamnya terkandung fenomena untuk saling ketergantungan, saling mengisi dan memberi bahkan persaingan dalam mencapai suatu tujuan. Fenomena ini menunjukkan, di era global masyarakat dunia dituntut untuk memiliki daya saing guna meraih berbagai peluang yang ada. Intinya dalam memasuki proses globalisasi perlu dipersiapkan unsur dari pelaku globalisasi itu sendiri, yakni manusia dengan pemilikan sumber daya manusia yang unggul (Micklethwait dan Wooldridge, 2007).

Masalah pengembangan sumber daya manusia di Indonesia telah menjadi isu sentral di berbagai lembaga, tak terkecuali dalam lingkungan lembaga pendidikan sejak beberapa dekade terakhir. Khusus untuk jenjang perguruan tinggi,



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

pemerintah telah mengeluarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012, sebagai pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang perjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur kelulusannya, agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang setara dengan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI dan standar kompetensi yang ditetapkan.

Rumusan kompetensi oleh pemerintah, juga telah direspon oleh Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk mendukung tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan profil lulusan yang profesional, LPTK memandang perlunya dirancang sebuah kurikulum yang menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi dengan membuat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian. Sekaitan dengan kurikulum, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah meluncurkan program revitalisasi LPTK pada tahun 2016 ini, dengan tujuan agar proses implementasi kurikulum yang berbasis KKNI juga dapat diimplementasikan berbasis wawasan kebangsaan. Program revitalisasi tersebut dinilai urgen agar lulusan tidak hanya dibekali dengan sejumlah kompetensi baik personal, sosial, dan intelektual, namun tetap mencirikan lulusan yang dapat menampilkan karakter berwawasan kebangsaan.

Paparan di atas, menunjukkan pendidikan adalah hal yang mendasar untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Dalam kaitan tersebut, Indonesia seperti banyak negara lainnya telah memasukkan konsep berkelanjutan sebagai salah satu prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan nasional. Hal ini ditunjukkan pada Undang-Undang Pendidikan Nasional yang menjadikan pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan atau pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu paradigma pembangunan pendidikan nasional (Hatzopoulos, 2007). Hal ini penting karena lulusan perguruan tinggi adalah salah satu pemangku kepentingan yang memegang peran penting dalam upaya tersebut. Begitupun bagi LPTK sebagai bagian dari komunitas pendidikan di Indonesia, memiliki kewajiban moral dalam mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem pendidikannya.

## PEMBAHASAN

Munculnya istilah pembangunan berkelanjutan adalah akibat dari tumbuhnya kesadaran terhadap globalisasi. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan. *World Commission on Environment and Development* (dalam McKeown, 2002), memberikan deskripsi dari Pembangunan Berkelanjutan sebagai : “*Sustainable development is development that meets the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs*“. Praktik-praktik keberlanjutan pada saat ini yang dilakukan oleh lembaga pendidikan akan



## SEMINAR NASIONAL

*“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”*

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

berdampak pada kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk mengaktualisasi peran pendidikan tinggi dalam mengejar masa depan berkelanjutan, diperlukan perubahan yang signifikan dalam pendidikan tinggi.

Pandangan dan kepercayaan terhadap masa depan dan berpikir holistik dengan visi jangka panjang menjadi suatu tuntutan. Tuntutan ini tentu saja juga menyentuh sumber daya manusia yang disediakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya mencetak mahasiswa yang berhasil dalam kehidupannya, tetapi juga individu-individu yang dapat berpartisipasi dalam membangun komunitas dan pembangunan berkelanjutan, dan kelompok-kelompok profesional di masyarakat di berbagai sektor kehidupan yang tanggap dan berkontribusi secara efektif pada pembangunan berkelanjutan. Kebutuhan tersebut menuntut pendidikan tinggi untuk mengakui dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik terhadap praktik-praktik yang dapat menghasilkan luaran yang terdepan, yang mampu mengupayakan untuk bergerak ke arah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Depdiknas, 2009). Berdasarkan pemikiran ini, LPTK sudah saatnya untuk mengedukasi dan melatih mahasiswa sebagai guru profesional di masa datang dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab untuk berupaya keras memenuhi kebutuhan di atas. Bila mahasiswa sebagai calon guru memahami paradigm berkelanjutan sebagai suatu aspek dari tanggung jawab moralnya, mereka akan menjadi warga negara yang melihat dirinya sebagai bagian dari alam dan manusia lainnya. Dengan demikian, kelak mereka akan mempunyai kapasitas untuk memfasilitasi pengembangan aktivitas-aktivitas pendidikan sebagai tanggung jawabnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

LPTK dalam mengaktualisasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, perlu merancang program pembangunan berkelanjutan untuk: (1) membantu mahasiswa belajar untuk berpartisipasi dalam membangun komunitas dan pembangunan berkelanjutan; (2) mengambil langkah terbaik yang dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan; dan (3) mengusahakan keterampilan dan atribut-atribut yang membantu kita berkontribusi pada keadilan sosial (Cortese, 1999). Terkait dengan hal tersebut, LPTK harus menyiapkan lulusan yang tidak hanya dengan kompetensi dasar terkait bidang pedagogik, tetapi juga kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dan bekerja dengan masyarakat dan lingkungan lokal maupun global dalam upaya untuk mengidentifikasi tantangan, risiko, dan dampak-dampak potensial dari setiap tindakan manusia. Lulusan LPTK tidak hanya memahami kontribusi pekerjaannya sebagai pendidik, tetapi juga dapat melakoni perannya sebagai warga negara dalam berbagai konteks kehidupan budaya, sosial, dan politik. Untuk itu, lulusan LPTK harus dapat bekerja dengan kompetensi: (1) dapat bekerja dalam tim multidisiplin untuk mengadaptasikan bidang yang ditekuni dengan kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan; (2) mampu mengaplikasikan pendekatan holistik dan sistemik untuk menyelesaikan persoalan; (3) dapat mengambil peran serta dalam berbagai kesempatan yang tersedia terkait pembahasan dan penentuan kebijakan ekonomi, sosial-budaya, politik dan lingkungan untuk membantu masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; (4) dapat mengaplikasikan pengetahuannya profesionalnya dalam



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

kaitannya nilai-nilai lokal (*the core values*) dan nilai-nilai universal; dan (5) berwawasan kebangsaan.

Berdasarkan pemikiran di atas, LPTK perlu melakukan reorientasi kurikulum dengan menekankan pada pengembangan pengetahuan secara nalar, keterampilan intelektual dan keterampilan sosial, perspektif dan nilai-nilai yang menuntun dan memotivasi mahasiswa sebagai calon guru untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap harus ditekankan dalam melakukan reorientasi terhadap kurikulum formal dalam menunjang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2006). Di bidang pengetahuan, kompetensi difokuskan pada: (1) dimensi sosial dan ekonomi; (2) perlindungan dan pengelolaan sumber daya; (3) mem-perkuat peran kelompok-kelompok utama; dan (4) cara-cara pengimplementasian pembangunan berkelanjutan (United Nations, 1992). Sedangkan untuk kompetensi keterampilan menurut McClaren (1989), jenis-jenis keterampilan yang diperlukan mahasiswa terkait pembangunan berkelanjutan di antaranya: (1) kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif (baik lisan maupun tulisan); (2) kemampuan untuk berpikir dengan pendekatan sistem; (3) kemampuan untuk mengelola waktu untuk memperkirakan, berpikir ke depan, dan untuk merencanakan; (4) kemampuan untuk berpikir secara kritis tentang isu-isu nilai; (5) kemampuan untuk memisahkan kuantitas, kualitas, dan nilai; (6) kemampuan untuk bergerak dari kesadaran ke pengetahuan dan diteruskan ke tindakan; dan (7) kemampuan untuk bekerja secara kooperatif dengan orang lain. Pada kompetensi yang ketiga berkaitan dengan sikap, yakni nilai-nilai yang perlu dibangun difokuskan pada nilai dasar penghormatan, yang meliputi: penghormatan terhadap orang lain, penghormatan terhadap generasi sekarang dan mendatang, dan penghormatan terhadap planet dari apa yang disediakan untuk umat manusia (sumber daya, fauna, dan flora). Oleh karena itu, nilai dan etika merupakan bagian sentral dari pengajaran pada semua disiplin keilmuan (UNESCO, 2006). Paradigma sekaligus tuntutan dalam mengaktualisasi pembangunan berkelanjutan sebagaimana dipaparkan di atas, menjadi tantangan bagi LPTK sebagai lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran untuk hidup dan kehidupan. Untuk memenuhi tuntutan, terutama dalam menghasilkan lulusan yang adaptif dan partisipatif dalam kehidupan abad ke-21, LPTK telah mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis KKNI. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum pendidikan diorientasikan pada rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan KKNI, yang meliputi: (1) standar isi pembelajaran; (2) standar proses pembelajaran; dan (3) standar penilaian. Bahkan pada program revitalisasi LPTK yang baru saja diluncurkan, implementasi kurikulum berorientasi KKNI juga aktualisasikan untuk menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan (Direktorat Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek, 2016). *Nation and Character Building* tetap dijadikan landasan revitalisasi untuk menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan dengan ciri memiliki: (1) pandangan *politic of recognition*; (2) prinsip *human dignity*; (3) *sense of social consciousness*; dan (4) rasa kebangsaan. Melalui pandangan *politic of recognition*, diharapkan akan lahir generasi yang menghargai keberbedaan dalam keberagaman (Setiawan, 2012).



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Mereka dapat menghayati, menerima dan menghormati keberbedaan etnis dan lainnya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadikannya sebagai modal kekayaan bangsa. Prinsip *human dignity* dikembangkan, agar mereka dapat menghormati harkat dan martabat manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Sedangkan *sense of social consciousness*, dihayati sebagai suatu kesadaran untuk dapat berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja sama atas dasar kepedulian dan kepemilikan (*having*) bersama nilai-nilai asli (*the core values*) jatidiri bangsanya.

Terakhir, rasa kebangsaan, dijadikan juga sebagai ranah kompetensi dalam menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini dan masa yang akan datang. Unsur keberlanjutan, yakni dinamisasi rasa kebangsaan dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadian bangsa. Dalam kedinamisannya, antar-pandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan benturan budaya dan kemudian bermetamorfosa dalam campuran budaya dan sintesanya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat dan kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan. Atas dasar kedinamisan tersebut, revitalisasi LPTK dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI, perlu juga diorientasikan pada basis berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan dengan karakter: (1) kemandirian (*self-reliance*), atau menurut istilah Presiden Soekarno adalah “Berdikari” (Basari, 1987). Dalam konteks aktual saat ini, kemandirian diharapkan terwujud dalam percaya akan kemampuan manusia dan penyelenggaraan Republik Indonesia dalam mengatasi krisis-krisis yang dihadapinya; (2) sikap demokratis, sebagai sikap yang menghormati kedaulatan rakyat dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran (Huntington, 1991); (3) mendahulukan Persatuan Nasional (*national unity*), dalam konteks aktual dewasa ini diwujudkan dengan kebutuhan untuk terwujudnya kebersamaan dan toleransi; dan (4) partisipasi warga dalam memperoleh pengakuan martabat internasional (*bargaining positions*), sebagai bentuk aktualisasi warga dalam membangun Indonesia yang bermartabat.

## KESIMPULAN

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan abad ke-21, terutama dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, LPTK telah mengembangkan kurikulum pendidikan berorientasi KKNI dengan penetapan standar baik pada isi pembelajaran, proses pembelajaran dan standar penilaian. Ouput dari pemberlakuan kurikulum ini, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang adaptif dan partisipatif dalam proses kehidupan di era global dengan



## SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia  
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

pemilikan kompetensi pada ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Bahkan pada program revitalisasi LPTK yang baru saja diluncurkan, implementasi kurikulum berorientasi KKNI juga aktualisasikan untuk menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan. *Nation and Character Building* tetap dijadikan landasan revitalisasi untuk menghasilkan lulusan berwawasan kebangsaan dengan ciri memiliki: (1) pandangan *politic of recognition*; (2) prinsip *human dignity*; (3) *sense of social consciousness*; dan (4) rasa kebangsaan. Program revitalisasi ini, sekaligus merupakan aktualisasi LPTK dalam pembekalan lulusan untuk memiliki *life and career skills, learning and innovation skill* dan *information media and technology skills*. Lulusan LPTK, harus memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan, terutama dalam menghadapi realitas kehidupan abad ke-21. Oleh karena itu, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan perlu dijadikan isu bersama bagi lembaga pendidikan tinggi, dikaji secara bersama guna menghasilkan sejumlah kebijakan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basari, H. 1987. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta : LP3ES. 1987.
- Cortese, A. 1999. Education for Sustainability: The Need for a New Human Perspective. *Second Nature Boston*. (Online), ([http://www. Seconda-ture.org](http://www.Secondature.org), diakses pada 9 September 2010).
- Direktorat Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti. 2016. *Panduan Program Revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Depdiknas. 2009. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2024*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Hatzopoulos, J. N. 2007. Ideals and Modern Tools to Achieve Sustainability in Higher Education, dalam W. L. Fihlo, E. L. Manolas, M. N. Sotirakou, & G. A. Boutakis (Eds). *Higher Edu-cation and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice*. Greece: Environmental Education Center of Soufli.
- Huntington, Samuel P. Democracy’s Third Wave, dalam *Journal of Democracy*, Spring 1991.
- McKoewn, R. 2002. Education for Sustainable Development Toolkit. Energy, Environment and Resources Center University of Tennessee. (Online), (<http://www.esdtoolkit.org>, diakses pada 15 Nopember 2010).
- Micklethwait, J dan Wooldridge, A. 2007. *A Future Perfect* (Penerjemah: Samsudin Berlian) Jakarta: Obor.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- McClaren. 1989. Education for Sustainable Development Toolkit. *UNESCO Education. Centre*. (Online), ([www.unesco.org/education/](http://www.unesco.org/education/) desd, diakses pada tanggal 2 Oktober 2010).
- Setiawan, D. 2012. *Integrasi dan Identitas Kebangsaan*. Medan: Unimed Press.